

## STRATEGI SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) SUMENEP DALAM MENEKAN ANGKA GOLPUT PADA PEMILU 2019

**Masriawan**

15040254006 (PPKn, FISH, UNESA) [masriawan@mhs.unesa.ac.id](mailto:masriawan@mhs.unesa.ac.id)

**Agus Satmoko Adi**

0016087208 ( Prodi S1 PPKn, FISH, UNESA) [agussatmoko@.unesa.ac.id](mailto:agussatmoko@.unesa.ac.id)

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep dalam menekan angka Golput pada Pemilu 2019, dan untuk mengetahui hambatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep saat melakukan sosialisasi dalam menekan angka Golput pada Pemilu 2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan berupa wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitiannya di kantor KPU Sumenep dengan alamat di Jl. Asta Tinggi No.99 Kebunagung Sumenep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui strategi sosialisasi yang digunakan oleh KPU Sumenep ada 14 basis sosialisasi. Hambatannya secara eksteren, masyarakat tidak mau menerima relawan demokrasi saat sosialisasi dan secara interen, keterlambatan alat peraga dari KPU Sumenep.

**Kata kunci:** KPU, Strategi, Pemilu 2019

### Abstract

The purpose of this study was to find out the socialization strategy of the Sumenep General Election Commission (KPU) in suppressing Golput during the 2019 Election, and to find out the obstacles of the Sumenep General Election Commission (KPU) when disseminating the number of Abstentions in the 2019 Election. is a type of qualitative research. Methods of data collection using in-depth interviews, documentation, and observation. Analysis of the data used is data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. The research location is at the KPU Sumenep office with the address on Jl. Asta Tinggi No.99 Sumenep Zoo. The results of qualitative research indicate that the socialization strategy used by the KPU of Sumenep has 14 bases of socialization. The obstacle is externally, the public does not want to accept democratic volunteers during socialization and internally, the delay in teaching aids from the KPU Sumenep.

**Keywords:** KPU, Strategy, 2019 Election

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara sangat besar dengan penduduk yang menempati peringkat terbesar ke-4 (empat) di dunia setelah Amerika Serikat, membuktikan dengan menjalankan sistem demokrasi salah satu ciri dari negara Indonesia. Penantian masyarakat yang cukup panjang harus dimanfaatkan dengan baik salah satunya mengenai Pemilihan Umum serentak tahun 2019 dan penyelenggaraan kali ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia baik itu mengenai pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPD RI, DPR RI dan Pilpres, dimana pelaksanaannya dilaksanakan dalam 5 tahun sekali. Ini merupakan tantangan baru terutama bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep (KPU).

Alasan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Sumenep dengan berpedoman pada tingkat kehadiran, dimana pada tahun 2014 partisipasi masyarakat mencapai 65% dengan 35% angka Golput. KPU Sumenep tetap optimis untuk Pemilu 2019 ini angka

kehadiran pemilih di atas 70%. Banyak cara yang sudah dilakukan salah satunya dengan meningkatkan relawan demokrasi yang diberi tugas untuk mensosialisasikan ke bawah agar warga tidak Golput. Itu Sebabnya peneliti melakukan penelitian di kabupaten Sumenep, karena kabupaten Sumenep terbesar di Madura dibandingkan dengan tiga Kabupaten lain seperti Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan.

Tabel 1. Data Angka Golput Di Kabupaten Madura

No.	Nama Kabupaten	Partisipasi	Golput
1.	Kabupaten Sumenep	65%	35%
2.	Kabupaten Pamekasan	79%	31%
3.	Kabupaten Sampang	90%	10%
4.	Kabupaten Bangkalan	87%	12,3%

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang

bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak manapun. Sumber: (<https://Penelitian.org/> diakses pada 4 November 2018)

Tujuh puluh tiga tahun pasca kemerdekaan bangsa Indonesia, bangsa Indonesia telah banyak mengalami perubahan dalam bidang sosial dan politik, seperti bergantinya roda pemerintahan dari otoriter menuju pemerintahan demokratis, perubahan tersebut disebabkan oleh periode kepemimpinan politik yang terus berganti. Pergantian elit politik nantinya akan menciptakan suatu perubahan dengan pemerintahan yang terlegitimasi dalam menjalankan roda kepemimpinan dalam sistem kenegaraan. Pemimpin akan ditentukan oleh rakyat yang nantinya dapat memberikan perubahan baru terhadap roda kepemimpinannya.

Tahun 2019 Indonesia akan melaksanakan Pemilu serentak akan dipilih DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI, dan Pemilihan Presiden. Namun dipemilihan serentak tahun 2019 ini menjadi fenomena baru yang sangat menarik untuk dilakukan penelitian, sebab dimana Pemilu sebelum-sebelumnya tidak secara bersamaan. Penelitian ini hanya fokus pada strategi sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep dalam menekan angka Golput untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini melihat pada data yang sebelumnya dimana angka Golput tinggi dan partisipasi masyarakat masih tinggi dan rendah.

Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan demokrasi perwakilan. Dengan demikian, Pemilu dapat diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai (Surbakti, 1992: 181). Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan pasal 1 ayat (2) bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang.

Demikian, kita harus menyadari bahwa untuk mewujudkan suatu Pemilu yang berkualitas, tidak hanya tergantung pada sistem yang baik tetapi juga tergantung pada penyelenggara, dalam hal ini KPU dan peserta Pemilu yaitu partai politik. Strategi sosialisasi yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Sumenep dalam menekan angka Golput pada Pemilu 2019 bisa meningkatkan partisipasi masyarakat khusus Sumenep.

Sehingga nantinya bisa berpengaruh terhadap angka Golput.

Berdasarkan banyak pengamat yang menganggap bahwa KPU perlu lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal ini terlihat banyak hal, dalam menjustifikasi tugasnya, dan mempunyai skala prioritas dalam menjalankan programnya. Pemilu nasional serentak berlangsung pada tanggal 17 April 2019. Keberhasilan itu sangat tergantung pada strategi sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep. Sehingga nantinya tidak ada lagi Golongan Putih (golongan yang tidak memilih, apabila KPU mau berbenah menuju ke yang lebih baik.

Menurut Delay (Efriza, 2012: 532). Golongan Putih diakronimkan menjadi Golput merupakan sekelompok masyarakat yang lalai dan tidak bersedia memberikan hak pilihnya dalam even pemilihan umum dengan berbagai macam alasan, baik pada Pemilu legislatif, pilpres, pilkada, maupun pemilihan kepala desa. Sedangkan menurut Budiman (Efriza, 2012: 535). Golput merupakan orang yang dengan sengaja datang ke TPS dan membuat pilihnya tidak sah dengan orang yang tidak percaya dengan hasil Pemilu dan tidak mau berpartisipasi. Ia tidak bisa datang ke TPS atau datang tetapi membuat suara tidak sah.

Masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya secara sukarela dalam pemilihan umum menyebabkan terjadinya penurunan partisipasi memilih. Penurunan partisipasi tersebut berdampak pada fenomena Golput yang akan mengkristal menjadi faktor internal demokrasi yang potensial. Sehingga menimbulkan pembusukan demokrasi atau pembusukan politik (*political decay*) nantinya akan berimplikasi melupakan demokrasi, dimana partai politik merupakan mesin pembangkit partisipasi politik dalam demokrasi secara moral ikut bertanggung jawab. Dalam arti proses demokrasi dimana menurunnya tingkat partisipasi memilih disatu sisi, dan disisi lain malah makin meningkat jumlah Golputnya yang berimplikasi negatif bagi pembangunan kualitas demokrasi (Soebagio, 2008: 85).

Fenomena penurunan partisipasi memilih tersebut seharusnya menjadi peringatan keras bagi praktik demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah bersama jajaran KPU diharapkan terus berbenah diri untuk memperbaiki kinerjanya. Meskipun di dalam Undang-Undang tidak ada aturan yang mengatakan partisipasi rendah menjadikan Pemilu tidak sah, namun partisipasi publik sangat penting. Sebab Pemilu merupakan fase terpenting dalam kehidupan sebuah negara demokrasi seperti Indonesia. KPU dengan segala upayanya mampu terus meningkatkan partisipasi publik untuk ikut menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.

Dengan demikian dapat meningkatkan citra KPU dimata publik (Sendhikasari, 2013: 20).

Strategi sosialisasi Komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Sumenep sangat diperlukan supaya masyarakat lebih mengerti dan paham pentingnya menggunakan hak pilih melalui sosialisasi yang diberikan. Dimana nantinya akan berdampak dengan berkurangnya kuantitas masyarakat yang tidak memilih di Pemilu 2019. Strategi yang diterapkan selama ini belum memberikan dampak yang sangat signifikan untuk menekan angka Golput dapat dilihat dari masih banyak jumlah Golput dari periode ke periode selanjutnya, ditingkat nasional dan pada Pemilu 2014 khususnya masyarakat Sumenep tingkat partisipasinya tergolong rendah. Strategi sosialisasi ini benar-benar harus dilakukan kepada masyarakat, supaya tingkat partisipasi tinggi dan angka Golput tertekan pada Pemilu 2019 supaya masyarakat menggunakan hak pilihnya agar semakin meningkat.

Penelitian ini menggunakan teori strategi menurut Fred R. David. Istilah perencanaan strategi pertama kali muncul pada tahun 1950-an dan menjadi sangat populer antara pertengahan 1960-an dan pertengahan 1970-an. Menurut Fred R. David (2010: 5) manajemen strategi didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Dalam penelitian ini manajemen strategi adalah kegiatan yang dirumuskan, diimplementasikan, serta di evaluasi oleh KPU Sumenep untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai adalah menekan angka Golput pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sumenep.

Menurut Fred R. David (2010: 6) proses manajemen strategi terdiri atas 3 tahapan yaitu sebagai berikut diantaranya: (1) Penyusunan strategi; (2) Pelaksanaan strategi; (3) Penilaian strategi. Perumusan strategi mencakup pengembangan visi dan misi yang ingin dicapai oleh KPU Sumenep. Identifikasi peluang dan ancaman eksternal, yaitu ancaman dari masyarakat yang tidak melakukan pemilihan atau Golput. Kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi-strategi alternatif, dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan.

Implementasi strategi mengharuskan organisasi untuk menetapkan tujuan tahunan berupa program-program yang dimiliki oleh KPU Sumenep dalam melakukan tugas yang wajib dilakukan sesuai dengan program yang dimiliki, membuat kebijakan, memotivasi anggota, dan mengalokasikan sumber daya. Sehingga strategi-strategi yang telah dirumuskan dapat dijalankan oleh KPU Sumenep sesuai dengan tujuan yang

diinginkan. Penerapan strategi biasa disebut sebagai “tahap aksi” dari manajemen strategi. Penerapan strategi yang berhasil tergantung pada kemampuan manajer untuk memotivasi karyawan yang lebih merupakan seni dari pada pengetahuan. Dalam penelitian ini, yang menjadi manajer adalah KPU Sumenep dimana nantinya sebagai manajer KPU Sumenep harus mempunyai kemampuan untuk memotivasi masyarakat Sumenep agar tidak Golput dan berpartisipasi dalam Pemilu 2019.

Penilaian strategi merupakan tahap akhir dalam manajemen strategi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep harus tahu kapan strategi tertentu tidak berjalan dengan baik, penilaian atau evaluasi strategi merupakan cara utama untuk memperoleh informasi semacam ini. Setiap strategi terbuka untuk dimodifikasi dimasa yang akan datang, karena berbagai faktor eksternal dan internal terus menerus berubah. Ada 3 aktivitas paling mendasar dari penilaian strategi ialah diantaranya sebagai berikut: (1) Peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini; (2) Pengukuran kinerja; (3) Pengambilan langkah korektif.

Penilaian strategi diperlukan karena apa yang berhasil saat ini tidak selalu berhasil nanti. Keberhasilan senantiasa menciptakan persoalan baru dan berbeda. Organisasi yang mudah berpuas diri akan mengalami kegagalan. Dibawah ini merupakan proses-proses strategi sebagai berikut: (a) Membuat pernyataan Visi dan Misi; (b) Melakukan audit eksternal dan internal; (c) Menerapkan tujuan jangka panjang; (d) Membuat, mengevaluasi, dan memilih strategi; (e) Mengimplementasikan strategi isu-isu manajemen; (f) Mengukur dan mengevaluasi kinerja

Mengidentifikasi visi, misi, tujuan, dan strategi yang dimiliki organisasi saat ini merupakan titik mula yang logis untuk manajemen strategi, sebab situasi dan kondisi organisasi saat ini mungkin menghalangi strategi tertentu untuk menyuruh melakukan langkah aksi khusus. Pernyataan visi, misi, tujuan dan strategi yang dimiliki suatu organisasi akan menjawab pertanyaan kemana suatu organisasi akan melangkah.

KPU Sumenep harus menganalisa lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan eksternal terdiri dari semua keadaan, baik itu peluang ataupun ancaman yang akan mempengaruhi pemilihan strategi. Sedangkan lingkungan internal organisasi akan menggambarkan kuantitas KPU Sumenep dalam menekan angka Golput pada Pemilu 2019, lingkungan internal organisasi juga akan menilai akan kekuatan dan kelemahan manajemen dan struktur organisasi.

Tujuan jangka panjang tentu ada hasil yang diharapkan oleh suatu organisasi dalam kurun waktu tahun dinamakan sasaran jangka panjang. Sasaran



seperti ini biasanya meliputi bidang-bidang sebagai berikut yaitu, hubungan antara anggota dengan anggota yang lain, tanggung jawab sosial dan pengembangan anggota. KPU Sumenep sudah mulai membuat suatu perencanaan strategi dengan memperhatikan aspek-aspek eksternal dan internal. Selanjutnya strategi-strategi yang sudah dibuat akan di evaluasi dan kemudian dipilih yang terbaik untuk digunakan dalam meningkatkan partisipasi untuk mengurangi angka Golput pada Pemilu 2019.

Pada tahap ini melakukan pengimplementasian strategi dengan memperhatikan isu-isu manajemen yang paling penting dalam proses pengimplementasian strategi isu-isu manajemen bagi penerapan strategi meliputi, penerapan tujuan program tahunan, pembuatan kebijakan, perubahan struktur organisasi yang ada, restrukturisasi dan rekayasa ulang. Perbaikan program penghargaan dan intensif, dan sebagainya.

Strategi yang dirumuskan dan diterapkan dengan cara yang terbaik sekalipun tidak akan berhasil manakala lingkungan eksternal dan internal dari organisasi berubah. Oleh sebab itu, sangat penting bagi organisasi untuk melakukan pengkajian ulang pengavaluasian dan pengendalian atas pelaksanaan strategi yang dijalankan.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena ingin menggambarkan strategi sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep dalam menekan angka Golput pada Pemilu 2019. (Denzin & Lincoln, 2011: 3). Bahwa penelitian kualitatif adalah suatu aktivitas berlokasi yang menempatkan penelitiannya di dunia. Penelitian kualitatif terdiri dari serangkaian praktik penafsiran material yang membuat dunia menjadi terlihat. Praktif-praktif ini mentransformasi dunia mereka mengubah dunia menjadi serangkaian representasi yang mencakup berbagai catatan lapangan, wawancara, percakapan, foto, rekaman dan catatan pribadi. Dalam hal ini penelitian kualitatif melibatkan suatu pendekatan penafsiran yang naturalistik terhadap dunia. Hal ini bahwa penelitian kualitatif mempelajari benda-benda di lingkungan alamiahnya, berusaha untuk memaknai atau menafsirkan fenomena dalam sudut pandang makna-makna yang diberikan oleh masyarakat.

Lokasi penelitian ialah lokasi dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau suatu peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan atau memperoleh data yang akurat. Penelitian ini dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep dengan Alamat yang terletak di Jl. Asta Tinggi no. 99 Kebunagung Sumenep,

mampu menerapkan strategi untuk menekan angka Golput pada Pemilu 2019.

Waktu penelitian ialah lamanya waktu yang digunakan oleh seorang peneliti untuk penelitian. Waktu dalam penelitian ini dimulai dari bulan November sampai April yaitu dimulai dari pengajuan judul sampai dengan penyempurnaan proposal penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data primer ialah yang dikumpulkan dan diolah sendiri pengguna data, diperoleh melalui wawancara secara intensif terhadap beberapa responden yang ditetapkan sebelumnya sebagai sampel dalam penelitian ini. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Informan instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri yang terjun kelapangan melakukan kegiatan, agenda, dan aktivitas. Sebab metode penelitiannya adalah diskriptif kualitatif sehingga tidak membutuhkan responden yang sangat banyak untuk di wawancarai. Sebagai informan harus teliti dan jeli dalam menentukan seorang yang akan dijadikan responden hal itu nantinya akan merimbas dan berpengaruh pada hasil penelitian. Teknik analisis data ini terdiri atas empat alur kegiatan diantaranya sebagai berikut: (1) Pengumpulan data; (2) Reduksi data (*data reduction*); (3) Penyajian data (*display data*); (4) Penarikan kesimpulan data (*verification*).

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Langkah awal dalam pengumpulan data adalah menentukan hal-hal apa saja yang diperlukan dalam mendukung pengumpulan data misalnya menentukan informasi berdasarkan kriteria tertentu, melakukan pengamatan pada pemilihan umum pada tahap awal sampai akhir. Mengumpulkan dokumen-dokumen tentang Komisi Pemilihan Umum Sumenep dan serta dokumen lain yang mendukung pengumpulan data penelitian. Berdasarkan teknik-teknik yang digunakan dapat menghasilkan berbagai informasi berkaitan dengan strategi sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Sumenep menekan angka Golput pada Pemilu 2019.

Menurut Miles dan Hubberman (1992:16). Reduksi data merupakan bagian dari analisis data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan. Pengabstrakan dan informasi data kasar dari penelitian yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data digunakan untuk memilih data yang dipakai data mana yang tidak dipakai atau diperlukan. Reduksi data dalam penelitian ini meliputi strategi sosialisasi KPU Sumenep dalam menekan angka Golput dan sosialisasinya.

Penyajian data ini berupa teks naratif untuk mendeskripsikan hasil dan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data ini menceritakan dengan fokus bagaimana Strategi sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam menekan angka Golongan Putih (GOLPUT). Penyajian data juga dapat disusun dengan menggunakan gambar atau grafik sehingga mempermudah dan memperlengkapi dalam memahami data.

Kesimpulan awal Kegiatan penyimpulan data dalam penelitian menjadi alur terakhir dalam penelitian. Penarikan kesimpulan dari data yang dikumpulkan, direduksi dan disajikan perlu juga diverifikasi misalnya dengan meninjau ulang catatan lapangan yang tersusun. (Miles dan Hubberman, 2002:19). Verifikasi pada penelitian ini mengenai strategi sosialisasi KPU Sumenep dalam menekan angka Golput pada Pemilu 2019, dan apa hambatan saat relawan demokrasi melakukan sosialisasi dalam menekan angka Golput tersebut kemudian diverifikasi dengan meninjau ulang catatan lapangan yang sudah tersusun.

Fokus penelitian Untuk memperjelas ruang lingkup penelitian, maka masalah yang akan dibahas terbatas yaitu tentang Strategi sosialisasi yang dilakukan oleh relawan demokrasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Sumenep dalam menekan angka Golput pada Pemilu 2019. Dimana Pemilu tersebut akan dilaksanakan hari Rabu Tanggal 17 April 2019. Agar nantinya pihak pembaca mudah mengetahui maksud dan tujuan penelitian, sehingga peneliti menggambarkan terlebih dahulu yaitu fokus penelitiannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Langkah – langkah dalam menyusun strategi

Strategi sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep dalam menekan angka Golput pada Pemilu 2019 dilakukan dengan menggunakan strategi, strategi tersebut dilakukan melalui langkah-langkah yang telah disusun oleh pihak KPU Sumenep. Langkah-langkah tersebut seperti yang disampaikan pak Anwar selaku sekretaris KPU Sumenep berikut pernyataan pak Anwar.

“Pertama, kita melakukan persiapan setelah itu merumuskan aksi serta anggaran yang akan digunakan disini KPU Sumenep banyak melibatkan para mahasiswa bahkan kita undang untuk menjadi tim narasumber yang sudah siap diterjunkan ke daerah-daerah serta pelosok-pelosok desa kami fasilitasi dengan baik. Anggaran khusus Pemilu di tahun 2019 ini sekitar 59 Miliar lebih”. (Wawancara. Anwar, 22 April 2019).

Pak Anwar selaku sekretaris KPU Sumenep, menyampaikan langkah yang pertama dilakukan mengajak para mahasiswa Sumenep untuk menjadi

narasumber. Serta mahasiswa itu diundang kemudian difasilitasi oleh KPU Sumenep.

“Kedua, KPU Sumenep mengajak dan menggandeng media massa apa yang disampaikan dilapangan sekecil apapun bisa diliput dan diketahui”. (Wawancara. Anwar, 22 April 2019).

Pernyataan yang kedua oleh Pak Anwar selaku sekretaris KPU Sumenep bahwa kedua KPU Sumenep mengajak dan menggandeng media massa. Jadi apa yang disampaikan di lapangan langsung diketahui untuk mengantisipasi informasi palsu.

“Gini mas yang ketiga, KPU Sumenep bekerja sama dengan *steac holders*, dan pemerintah daerah setempat karena sebuah penyusunan strategi tersebut harus diberitahu agar nantinya strategi yang diterapkan benar-benar tercapai sesuai dengan harapan KPU Sumenep dan juga semua masyarakat”. (Wawancara. Adi 13 April 2019).

Pernyataan yang berbeda juga disampaikan oleh pak Adi selaku kesubbag teknis Pemilu dan Hubmas dimana langkah ketiga KPU Sumenep bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat agar nantinya setiap langkah demi langkah dalam penyusunan strategi bisa dilakukan dengan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa KPU Sumenep dalam menyusun strategi pertama mengajak mahasiswa, kedua menggandeng media massa, dan ketiga bekerja sama dengan pemerintah daerah.

“Strategi secara kelompok Strategi secara kelompok kami disini mengundang kelompok masyarakat atau dalam bahasa Maduranya *kompolan-kompolan*, kelompok masyarakat pecinta mobil besar, masyarakat petani, masyarakat pemulung, masyarakat nelayan, kemudian kami juga melibatkan relawan demokrasi, jadi tidak secara linier saja dari KPU, PPS, PPK, sehingga kami melibatkan banyak kelompok”. (Wawancara. Pak Anwar, 22 April 2019).

Pernyataan pak Anwar selaku sekretaris KPU Sumenep menyampaikan bahwa strategi secara kelompok relawan demokrasi masuk ke sebuah kompolan masyarakat, pecinta mobil besar, masyarakat petani, masyarakat pemulung, dan masyarakat nelayan. Disitu disampaikan mengenai Pemilu 2019.

“Strategi secara kekeluargaan kami disini menerjunkan relawan kami ke-setiap daerah-daerah atau desa-desa yang berada di Kabupaten Sumenep untuk terus melakukan sosialisasi, sebab Kabupaten Sumenep sangat luas dengan 9 Kecamatan yang berada di kepulauan terumana. Dan waktunya itu sudah kami tentukan sebelumnya tujuannya supaya sosialisasi yang dilakukan tercapai”. (Wawancara. Anwar, 22 April 2019).

Pak Anwar selaku sekretaris KPU Sumenep memberikan pernyataan bahwa strategi kekeluargaan

relawan demokrasi yang diterjunkan lebih diutamakan di bagian kepulauan yang berada dibagian ujung timur Sumenep. Sebab untuk sampai ke pulau Sumenep bagian timur membutuhkan waktu sebanyak 8-15 Jam baru sampai ke dermaga.

“Kita selalu menyampaikan kepada masyarakat saat melakukan sosialisasi mas, bahwa terut berpartisipasi saat Pemilu itu penting terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena tidak ikut berpartisipasi itu berarti masyarakat membiarkan yang menjadi pemimpin tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat. Makanya eee..kami selalu melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat betapa pentingnya untuk berdemokrasi menyalurkan hak pilihnya yang diselenggarakan nanti pada tanggal 17 April 2019”. (Wawancara. Adi, 13 April 2019).

Pernyataan pak Hadi selaku divisi SDM dan Parmas menyampaikan bahwa strategi sosialisasi yang digunakan oleh KPU Sumenep sudah dirubah dengan cara yang lain agar nantinya masyarakat bisa menggunakan hak suaranya penjelasannya sebagai berikut.

“Strategi sosialisasi KPU disini melakukan pendekatan secara massif, secara terstruktur, dan secara sistematis mulai dari KPU Kabupaten, PPK ditingkat Kecamatan, PPS ditingkat Desa, dan KPPS ditingkat TPS. Selain itu sosialisasi yang dilakukan juga mengajak bersama-sama relawan demokrasi, mengajak ormas, mengajak Organisasi Kepemudaan (OKP) supaya mereka berpartisipasi aktif untuk mensosialisasikan Pemilu 2019, sehingga angka Golput bisa tertekan sedemikian rupa”. (Wawancara. Hadi, 15 Mei 2019).

Penjelasan dari pak Hadi strategi sosialisasi bahwa KPU Sumenep melakukan pendekatan secara massif, secara terstruktur, dan secara sistematis artinya disini lebih menekankan PPS, PPK, & KPPS yang ada di setiap desa, kecamatan, kabupaten sehingga nantinya tujuan utamanya dari KPU Sumenep mampu mengajak masyarakat agar tidak Golput.

Bapak Hadi memberikan penjelasannya mengenai strategi yang digunakan oleh KPU Sumenep ataupun relawan demokrasi diantaranya sebagai berikut.

“Strategi melalui media massa KPU Sumenep meminta dan bekerja sama dengan media masaa untuk mendorong mensosialisasikan Pemilu ini juga mengkapanyekan visi, misi, dan program kepada peserta Pemilu. Strategi partisipasi aktif Strategi partisipasi aktif adalah suatu strategi yang digunakan oleh KPU Sumenep untuk mendorong masyarakat dan juga tokoh agama supaya berpartisipasi pada Pemilu 2019 agar masyarakat tidak Golput. KPU Sumenep mendorong dari seluruh peserta Pemilu dari tim kampanye juga juru kampanye dari masing-

masing kampanye itu untuk menyisir seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Sumenep selama ini yang belum mencakup, kita berharap dengan ada tim kampanye bisa menyisir seluruh masyarakat sehingga masyarakat bisa menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2019. Juga berharap tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat kita dorong untuk mengajak ummatnya atau warga di Sumenep”. (Wawancara. Hadi 15 Mei April 2019).

Pernyataan Pak Hadi selaku divisi SDM dan Parmas KPU Sumenep menyatakan bahwa strategi melalui media massa itu merupakan strategi lama yang digunakan oleh KPU Sumenep namun hanya sebagai tambahan. Sedangkan strategi partisipasi aktif tujuannya untuk meningkatkan masyarakat agar datang langsung menggunakan hak suaranya ke TPS setempat. Seperti yang dikatakan oleh pak Hadi selaku divisi SDM dan Parmas menyatakan sebagai berikut.

“Sampai sekarang angka Golput di Sumenep sangat minim ya, jadi dipastikan partisipasinya tinggi untuk Pemilu 2019 ini dan angka Golput kecil. Jadi partisipasi buat Pemilu 2019 sangat tinggi mas. Strateginya kita menggandeng semua elemen masyarakat, semua organisasi kepemudaan (OKP), semua ormas, semua tokoh masyarakat dan tokoh agama, menggandeng pemerintah daerah, menggandeng juga relawan demokrasi yang melakukan sosialisasi kepada basis-basis seperti pemilih perempuan, kaum marjinal, pemilih pemula dan kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus”. (Wawancara. Hadi, 15 Mei 2019).

Pak Hadi menyatakan Golput di Sumenep untuk Pemilu 2019 sangat minim dan dipastikan partisipasinya tinggi serta angka Golput kecil. Pernyataan yang hampir sama disampaikan oleh Pak Adi selaku Kesubbag Pemilu dan Hupmas menyatakan sebagai berikut.

“Tentunya dalam melaksanakan sosialisasi KPU berpedoman pada Undang-Undang dan peraturan yang mengatur tentang sosialisasi, dari situ KPU Sumenep terutama komisioner menjabarkan peraturan tersebut menyusun strategi-strategi yang akan dilaksanakan di kabupaten sumenep dengan mengakomodir budaya-budaya lokal untuk menyesuaikan”. (Wawancara. Adi, 13 April 2019).

Pernyataan pak Adi sama dengan pendapat dari Pak Anwar selaku sekretaris KPU Sumenep menyampaikan bahwa strategi sebenarnya sudah sangat berjenjang mulai dari Provinsi terus ke Kabupaten dimana strategi sosialisasi itu disesuaikan dengan keadaan masyarakatnya di setiap Kabupaten penjelasannya sebagai berikut.

“Jadi kita kan sudah secara berjenjang dari KPU RI turun sampai ke Provinsi-Provinsi terus



sampai ke Kabupaten-Kabupaten, seperti yang disampaikan tadi mas, kami terjun di *kompolan-kompolan* istilah ini hanya ada di Madura memang ada kearifan lokal dan kami dalam melakukan sosialisasi menggunakan strategi pendekatan secara lokal mas, kalau kita ditanyakan strategi umum memang sudah ada dari pusat sampai didaerah, namun tata cara penyampaian kami rubah dengan menyasar ke *kompolan-kompolan* tadi supaya lebih efektif, karena kelompok itu sudah mempunyai massa berkelompok yang cukup lama”. (Wawancara. Anwar, 22 April 2019).

Kalau melihat dari beberapa pendapat informan di atas, tentunya dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa strategi sosialisasi yang digunakan oleh KPU Sumenep itu memang disesuaikan dengan kebudayaan dan kearifan lokal di Kabupaten Sumenep. Serta berpengaruh terhadap sosialisasi yang dilakukan dalam melakukan sosialisai memang ada beberapa basis-basis tertentu disasar oleh KPU Sumenep dan setiap basis itu ada masing-masing relawan yang diterjukan dan jadwal penyampaian sudah ditentukan sebelumnya. Pak Adi selaku Kesubbag teknis Pemilu dan Hubmas menyampaikan sebagai berikut.

“Kalau berkaitan dengan sosialisasi supaya masyarakat tidak Golput pada Pemilu serentak tahun 2019. KPU menyampaikan informasi berupa jenis pemilihan umum dan betapa pentingnya satu suara yang harus disuarakan yang menyakut hak-hak mereka dan kami menjamin konstitusinya supaya tersalurkan bahwa itu penting untuk menentukan pemimpin dan wakil-wakil seterusnya. Cara menyampaikan sosialisasi ada yang *face to face*, ada yang Verbal, ada yang menggunakan alat, ada yang dokumen brosur dsb bisa diluar ruangan dan di dalam ruangan di dalam ruangan kami undang mereka ke Kantor KPU Sumenep sedangkan diluar ruangan kami datang langsung ke tempat-tempat mereka, rumah-rumah mereka kepada sekolah kami datang baik yang Negeri maupun swasta. Kalau kegiatan seperti ini ada tahapan yang dimaksud dengan sosialisasi *go to school* dari sini kita tentukan ke sekolah mana saja baik itu di sekolah Kota atau di Sekolah Desa. Sosialisasi yang dilakukan pertama menggunakan metode tatap muka, juga dialog ceramah, tanya jawab, melalui radio, dan melalui media cetak dll”. (Wawancara. Adi, 13 April 2019).

Pernyataan dari Pak Adi ditegaskan oleh Bapak Warist selaku ketua KPU Sumenep menyampaikan tentang sosialisasi agar masyarakat ngerti dan memahami betul bahwa sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi sehingga ada tahapannya sebagai berikut.

“Kalau diawal-awal kita lakukan sosialisasi Undang-Undang tentang Pemilu, ditengah-tengah

kita sosialisasi Pemilu dan demokrasi tentang siapa yang berhak memilih dan juga pemutahiran data, dan diakhir kita lakukan sosialisasi tentang tata cara memilih. Relawan yang kita bentuk kemarin itu Cuma berbicara tentang tata cara memilih dan demokrasi baik dan benar kalau masalah Undang-Undang Pemilu KPU Sumenep sendiri yang terjun langsung ke lapangan”. (Wawancara. Warist, 06 Mei 2019).

Kapan sosialisasi dilakukan hal itu ditegaskan oleh Pak Warits selaku Ketua KPU Sumenep menyampaikan mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh relawan demokrasi saat menyasar kepada masyarakat Sumenep sebagai berikut.

“Kami melakukan sosialisasi dari awal mas, sebab merupakan pekerjaan yang paling lama di KPU Sumenep sejak Pemilu dicanangkan sekitar dua tahunan yang lalu sudah dilakukan sosialisasi sampek hari H-1 kita tetap lakukan yang namanya sosialisasi”. (Wawancara. Anwar, 06 Mei 2019).

Pendapat Pak Warits selaku ketua KPU Sumenep berbeda dengan Pak Hadi selaku Kesubbag Pemilu dan Hubmas bahwa menyatakan sebagai berikut.

“Sosialisasi dilakukan mulai dari awal tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019 sampai kalau menurut tahapan itu sampai tanggal 13 April 2019. Tapi kami tidak berhenti *door to door* melalui petugas kami di masing-masing TPS. Jadi ada ketua KPPS mulai H-6 bertugas untuk menyebar luaskan model c-6 yaitu, surat pemberitahuan pelaksanaan Pemilu 2019 ke masing-masing pemilih yang ada di Kabupaten sumenep. KPPS itu mas, kepanjang tangannya KPU yang bertugas di masing-masing TPS”. (Wawancara. Adi, 13 April 2019).

Pendapat Pak Warits selaku ketua pernyataannya tadi bahwa sosialisasi itu dilakukan dua tahun sebelum Pemilu berlangsung dan penjelasan tersebut sama dengan Pak Hadi selaku divisi SDM dan PM menyampaikan sebagai berikut.

“Sosialisasi kita lakukan semenjak dua tahun sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi yang tentunya sudah sesuai dengan tahapan-tahapan sampek hari tenang. Setiap hari siang dan malam kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan langkah-langkah dan strategi yang sudah direncanakan sebelumnya”. (Wawancara. Hadi, 15 Mei 2019).

Pernyataan informan diatas, berbeda-beda mengenai kapan pelaksanaan sosialisasi dilakukan, namun secara jelas sosialisasi untuk Pemilu 2019 sudah mulai sejak dua tahun yang lalu sebelum keberlangsungan Pemilu tersebut. Supaya bisa menarik simpati masyarakat khususnya Sumenep alhasil nanti mampu berpengaruh terhadap kurangnya angka Golput dan meningkatnya partisipasi masyarakat. Ini menjadi bukti keseriusan KPU Sumenep Sebenarnya sosialisasi juga bukan

tanggung jawab KPU semata. Tetapi semua elemen, partai politik, pemerintah juga bertanggung jawab untuk mensosialisasikan, mengkampanyekan, mempublikasikan, dan memberikan informasi kepada masyarakat lain yang dimana belum tahu sama sekali tentang Pemilu. Sehingga hak suaranya tidak terbuang secara sia-sia sebab satu suara itu sangat penting dan sangat berharga buat pemimpin yang akan dipilih.

### **Strategi sosialisasi KPU Sumenep dalam menekan angka Golput pada Pemilu**

Penelitian ini mengkaji tentang strategi sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep dalam menekan angka Golput pada Pemilu 2019, disebabkan angka Golput pada Pemilu sebelumnya di Kabupaten Sumenep sangat tinggi dan juga belum terdapat penelitian yang serupa khusus di Kabupaten Sumenep.

Sosialisasi KPU Kabupaten Sumenep kepada pedagang pasar. Sesuai penyajian data dan didukung oleh observasi yang telah dilakukan peneliti mengenai strategi sosialisasi KPU Sumenep kepada pedagang pasar tersebut, menunjukkan bahwa sudah berjalan sangat baik hal tersebut dapat dilihat dari muatan materi sosialisasi yang disampaikan sama relawan demokrasi yaitu menjelaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilihan umum, menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan hak suaranya pada saat Pemilu. Di dalam materi-materi tersebut sudah menjelaskan mengenai gambaran pemilihan umum yang akan berlangsung, serta dapat mendorong keterlibatan pedagang pasar untuk menggunakan hak suaranya pada saat pencoblosan.

Metode yang dipakai oleh KPU kepada basis ini yaitu berupa tatap muka langsung dengan pola pelaksanaannya seperti menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, serta menyebarkan alat peraga sosialisasi seperti brosur, panflet, poster dll. Metode ini digunakan karena disesuaikan dengan kesibukan masyarakat di pasar.

Sosialisasi KPU Kabupaten Sumenep kepada masyarakat nelayan. Berdasarkan penyajian data dimuka seperti yang didukung oleh beberapa observasi yang dilakukan oleh peneliti tentang strategi sosialisasi oleh KPU Sumenep, menunjukkan bahwa dari muatan materi sosialisasi yang diberikan sudah benar-benar sesuai dengan materi tersebut sebab masyarakat nelayan yang kesehariannya disibukan dengan pekerjaan dilaut.

KPU Sumenep dalam menggunakan sosialisasinya metode yang digunakan berupa tatap muka langsung dengan pola pelaksanaannya yaitu ceramah, simulasi pencoblosan, serta pembagian alat peraga sosialisasi kepada relawan demokrasi dengan maksud agar masyarakat nelayan tersebut dapat mengerti pentingnya

berpartisipasi pada pemilihan umum untuk memilih seorang pemimpin yang akan mengantarkan pembangunan kearah yang lebih maju. Oleh sebab itu dapat mencegah terjadinya kekeliruan pada saat pencoblosan yang akan menyebabkan suara tidak sah. Dari strategi sosialisasi yang sudah dilakukan oleh relawan demokrasi kepada basis masyarakat nelayan ini membuktikan bahwa ada kesesuaian antara materi sosialisasi, sasaran sosialisasi, serta metode sosialisasi dengan karakteristik sasaran yang dituju, selain itu strategi sosialisasi ini sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan yang ada.

Sosialisasi KPU Kabupaten Sumenep kepada masyarakat adat. Strategi sosialisasi yang digunakan oleh KPU Sumenep kepada masyarakat adat ini dapat dilihat dari sumber materi sosialisasi yang diberikan sehingga menunjukkan adanya kejelasan pelaksanaan pemilihan umum tersebut, agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat adat tentang pentingnya berpartisipasi pada pelaksanaan pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Hal ini dapat dilihat dari sumber materi yang dijelaskan oleh relawan demokrasi saat sosialisasi yaitu mencakup informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilihan umum serta menghimbau kepada masyarakat adat untuk datang menggunakan hak suaranya pada saat pencoblosan.

Sosialisasi KPU Kabupaten Sumenep kepada pemilih penyandang disabilitas. Pak Adi memberikan penjelasan tentang sosialisasi yang dilakukan oleh relawan demokrasi kepada penyandang disabilitas bahwa untuk tim relawan demokrasi memang ada khusus pernyataan sebagai berikut.

“Sosialisasi disabilitas itu banyak macamnya seperti tuna daksa (tubuhnya kurang sempurna) tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara. Ketika kita melakukan sosialisasi kita butuh pendamping istilahnya butuh orang khusus untuk menyampaikan sosialisasi. Untuk masalah waktu mas,,kami berkoordinasi dengan sebuah lembaga dan organisasi dan kami merekrut relawan demokrasi khusus menyasar kepada penyandang disabilitas, pemulung, nelayan, pengemis, dll”. (Wawancara. Adi, 13 April 2019).

Pak Adi selaku kesubbag teknis Pemilu dan Hubmas menyampaikan pernyataannya dimana sosialisasi yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas banyak macamnya disitu butuh pendamping atau ada relawan khusus yang menanganinya. Sehingga relawan demokrasi yang di tugaskan untuk melakukan sosialisasi kepada penyandang disabilitas yang sudah mempunyai pengalaman sebelumnya agar nantinya sosialisasi yang dilakukan relawan demokrasi tujuannya tercapai. Seperti memberikan bimbingan terlebih dahulu terhadap tim



relawan demokrasi sebelum biar nanti setelah terjun kelapangan hasilnya tercapai.

Tabel 4. Data Angka Golput Penyandang Disabilitas

Jumlah seluruh pemilih disabilitas terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK	LK	409
	PR	484
	JML	893
Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	114
	PR	124
	JML	238
Angka Golput		655

Sumber: KPU Sumenep, 2019

Mas Abdul Waris selaku relawan demokrasi khusus penyandang disabilitas memberikan pernyataan diantaranya sebagai berikut.

“Untuk jumlah relawan demokrasi mas, jumlah secara keseluruhan kami yaitu 50 itu ada 11 pembagian setiap kelompok ada 5 orang. Strategi yang digunakan ke penyandang disabilitas yaaa kami mas, bilang kepada mereka bahwa mau silaturahmi mau minta waktu bilang kalau kami dari relawan demokrasi untuk disabilitas di daerah Sumenep itu yang ada hak pilinya ada dua SLB darmawanita, dan SLBN Sarongkih semua itu untuk SLB di daerah sumenep. Tapi mas yang dua itu belum punya hak pilih masih di bawah umur 17 tahun. Kalau buat penyandang disabilitas mas,,ada media khusus yg digunakan atau ada tambahan kan kalau dalam Bahasa Madura *bede serabeng* atau tidak bisa melihat, *bede setengel* atau tidak bisa mendengar”. (Wawancara, Abdul Waris 19 Juli 2019).

Seperti pernyataan Mas Abdul Waris selaku relawan demokrasi penyandang disabilitas memberikan penjelasannya bahwa untuk jumlah relawan demokrasi yaitu 50 setiap kelompok 5 orang jumlahnya. Sedangkan penyandang disabilitas di daerah Sumenep itu terdapat 4 SLB tapi yang mempunyai hak pilih hanya terdapat dua adalah SLB Darmawanita dan SLBN Saronggi. Media yang digunakan untuk penyandang disabilitas menggunakan media khusus.

Sosialisasi KPU Kabupaten Sumenep kepada Umat Agama. Sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada basis keagamaan selama ini diorientasikan kepada tokoh-tokoh agama saja. Akibatnya jamaah berbagai agama di Indonesia yang jumlahnya sangat besar dan tak sebanding dengan jumlah tokohnya tidak tersentuh. Sosialisasi dan pendidikan pemilih tidak mengakar kuat Informasi Pemilu dan demokrasi beredar di tataran elit keagamaan saja. Orientasi sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada basis keagamaan ke depan harus diubah dari gerakan yang elitis menjadi gerakan populer. Distribusi dan konsumsi informasi kepemiluan dan demokrasi harus masuk ke dalam ruang kehidupan para jamaah. Penyelenggara Pemilu harus dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan kelompok keagamaan agar dapat menggunakan forum-forum keagamaan seperti

pengajian sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan pemilih. Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke jamaah sholat jumat, jamaah gereja/pura/wihara/klenteng dan lain sebagainya.

“Media yang digunakan saat sosialisasi mas, relawan demokrasi lebih banyak menggunakan alat peraga seperti surat suara, bagaimana cara mencoblos, kapan Pemilu akan berlangsung. Meteri yang disampaikan itu mas, tergantung dengan sekminnya pemilih perempuan, pemilih ke agamaan relawan demokrasi menggunakan *power point* yang lain sama yaaa”. (Wawancara. Abdul Waris 19 Juli 2019).

Pernyataan dari mas Abdul Waris selaku relawan demokrasi memberikan pengertian mengenai media yang digunakan saat relawan demokrasi melakukan sosialisasi. Media saat sosialisasi ke umat beragama, dan pemilih perempuan menggunakan yaitu, *power point* sedangkan kepada basis yang lainnya sama semua alat peraga seperti surat suara, bagaimana cara mencoblos, dan kapan Pemilu berlangsung semua sudah disediakan oleh KPU Sumenep.

Sosialisasi KPU Kabupaten Sumenep kepada keluarga. Basis keluarga sebagai salah satu orientasi gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih karena keluarga merupakan unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua institusi. Keluarga merupakan kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal. Hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Bahkan adapula ahli yang menyebutkan keluarga adalah abstraksi dari sebuah ideologi yang memiliki citra romantik, suatu proses, sebagai satuan perlakuan intervensi, sebagai suatu jaringan dan tujuan atau peristirahatan akhir.

Pada akhirnya semua basis pemilih yang ada di tengah-tengah masyarakat akan kembali kepada keluarganya masing-masing kebutuhan mereka baik secara fisik maupun psikologis anggotanya dipenuhi melalui struktur keluarga, termasuk kebutuhan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Tidak ada seorang manusiapun di dunia ini yang dapat melepaskan diri dari lingkungan keluarga. Ketika seseorang itu melepaskan diri dari unit keluarganya, maka sesungguhnya orang tersebut telah melepaskan diri dari struktur sosial masyarakat atau menjadi asosial. Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke ibu-ibu arisan, perkumpulan rutin tingkat RT/RW, dan sebagainya.

Sosialisasi KPU Kabupaten Sumenep kepada pemilih pemula gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih diorientasikan kepada pemilih pemula atau *first time voters*. Sejumlah riset menunjukkan pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya ketika pertama kali memasuki usia memilih, mempunyai kecenderungan

untuk memilih pada pemilu. Sebaliknya mereka yang tidak menggunakan hak pilih ketika pertama kali memasuki usia memilih, kecenderungannya akan melakukan hal yang serupa pada pemilu berikutnya.

Pemilih pemula adalah mereka yang akan memasuki usia memilih dan akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam Pemilu. Dengan siklus pemilu di Indonesia yang digelar setiap lima tahun sekali, maka kisaran usia pemilih pemula adalah 17-21 tahun. Pemilih pemula umumnya masih duduk di sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat dan mereka yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Diluar itu, anak-anak putus sekolah yang berusia 17-21 tahun juga merupakan basis pemilih pemula yang membutuhkan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Pemilih pemula yang berstatus mahasiswa merupakan elemen penting dalam struktur dan dinamika politik dan demokrasi. Mereka memiliki potensi besar sebagai penggerak perubahan karena mempunyai horizon atau cakrawala yang luas diantara masyarakat. Mahasiswa sebagai kelompok yang akan memulai tahapan atas dari sebuah susunan kekuasaan, struktur perekonomian dan prestise dalam masyarakat dengan sendirinya merupakan elit di dalam kalangan angkatan muda. Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke sekolah-sekolah (SMA/SMK/MA/Sederajat) dan sebagainya.

Sosialisasi KPU Kabupaten Sumenep kepada pemilih pemuda. Basis pemilih muda dijadikan sebagai basis gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih karena jumlah mereka dalam struktur pemilih yang cukup signifikan. Mereka yang disebut pemuda sesuai Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah warga Negara yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Dalam konteks Pemilu, mereka yang disebut basis Pemilih muda adalah warga Negara yang telah memiliki hak pilih dan usianya tidak melebihi 30 tahun. Dengan demikian, kisaran usia pemilih muda adalah 22 tahun sampai 30 tahun.

Pemilih muda baik yang berstatus mahasiswa, pekerja maupun belum/tidak bekerja penting mendapat sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka akan mengisi struktur pemilih dalam jangka waktu yang sangat lama. Edukasi secara terus menerus dibutuhkan agar kepercayaan mereka terhadap pemilu sebagai instrumen demokrasi makin kuat dan mendalam. Kebiasaan mereka memilih harus dipupuk dan disemai agar tidak tergerus oleh apatisisme maupun pragmatisme politik yang pada akhirnya akan merusak kualitas demokrasi. Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke organisasi kepemudaan, mahasiswa kampus dan sebagainya.

Sosialisasi KPU Kabupaten Sumenep kepada pemilih marjinal (orang pinggiran). Kelompok marginal menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka tidak memiliki sumber daya, akses informasi, dan kepercayaan diri yang cukup. Mereka memiliki hak hidup dan hak berpartisipasi yang sama dengan warga Negara lainnya. Tetapi situasi dan kondisi kehidupan membuat mereka dalam posisi yang tidak berdaya dan tidak memiliki motivasi berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Mereka membutuhkan sosialisasi, motivasi dan fasilitasi untuk dapat berpartisipasi sehingga secara sosial mereka tidak makin terbelakang.

Sosialisasi KPU Kabupaten Sumenep kepada komunitas. Komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya. Dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan nilai dan kepentingan. Dalam komunitas, manusia-manusia individu di dalamnya memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa.

Sosialisasi KPU Kabupaten Sumenep kepada pemilih perempuan. Basis pemilih perempuan menjadi sasaran sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka tidak hanya akan memainkan peran strategis dalam mengasuh dan mendidik anak ketika mereka menjadi ibu rumah tangga. Tetapi juga dapat memainkan peran untuk memotivasi dan mengedukasi lingkungan, setidaknya pada komunitasnya. Perempuan yang berstatus ibu memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk pengetahuan, sikap dan tingkah laku anak. Pengaruh kehidupan keluarga yang didominasi oleh peran ibu baik langsung maupun tidak langsung merupakan struktur sosialisasi politik pertama yang dialami seseorang sangat kuat dan kekal.

Pengalaman berpartisipasi dalam membuat suatu kebijakan keluarga dapat meningkatkan perasaan kompetensi politik anak agar dapat memberikan kecakapan-kecakapan untuk melakukan interaksi politik, sehingga membuat lebih berpartisipasi dengan aktif dalam sistem politik nanti setelah dewasa. Keluarga juga dapat membentuk sikap-sikap politik masa depan anak dengan menempatkan individu dalam dunia kemasyarakatan yang lebih luas. Selain perempuan sebagai sosok sentral dalam mendidik anak, alasan lain menjadikan perempuan sebagai basis sosialisasi dan pendidikan pemilih adalah: (1) Jumlah pemilih perempuan berimbang dengan jumlah pemilih laki-laki, namun kapasitasnya masih terbatas dibanding laki-laki; (2) Pemilih perempuan rentan dimobilisasi ketika pemilu maupun diluar Pemilu; (3) Tingkat pendidikan perempuan rata-rata lebih rendah dari laki-laki; (4) Pemilih perempuan lebih banyak memainkan peran-

peran domestik sehingga urusan publik terabaikan, padahal banyak menyangkut kepentingan perempuan.

Sosialisasi KPU Kabupaten Sumenep kepada pemilih berkebutuhan khusus. Pemilih berkebutuhan khusus mereka normal seperti biasa tidak bisa mendapatkan informasi layaknya masyarakat biasa pada umumnya, dia itu sudah tinggal di pedesaan, tidak bisa baca, tidak bisa nulis dan fasilitas TV dan segala macam, dan pemilih berkebutuhan khusus termasuk warga binaan yang ada di rumah tahanan. Jadi kami ada relawan yang konsen khusus melakukan sosialisasi kepada masyarakat basis pemilih berkebutuhan khusus. Pemilih berkebutuhan khusus yakni pemilih yang mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.

Sosialisasi KPU Kabupaten Sumenep kepada warga internet. Karena pengguna internet di Indonesia cukup banyak sekali angkanya itu hampir 50% terutama di kabupaten Sumenep, makanya oleh KPU RI warga internet harus juga diberikan sosialisasi. Peningkatan akses informasi menggunakan internet terus bertambah setiap tahun, berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2016, pengguna internet Indonesia saat ini mencapai 132,7 juta. Dari jumlah tersebut sebanyak 70 persen dari pengguna internet Indonesia paling sering mengakses internet dari perangkat bergerak atau *mobile gadget*. Aktivitas komunikasi dan akses informasi menggunakan internet tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Melalui *smartphone*, manusia milenial dapat berkomunikasi dan mengakses informasi kapanpun dan di manapun sepanjang tersedia jaringan komunikasi. Diskursus politik, demokrasi dan Pemilu di dunia maya harus mampu kita imbangi melalui status, kicauan dan komentar-komentar yang segar, elegan, cerdas dan mendidik.

Sosialisasi KPU Kabupaten Sumenep kepada komunitas peduli demokrasi. Penyampaian model sosialisasi dengan menggunakan tatap muka, dan media sudah tidak menarik lagi sehingga KPU Sumenep merubahnya dengan cara memperbanyak melakukan suatu kegiatan yang sifatnya mampu meningkatkan cita-citanya selain ikut lomba juga mengasah kemampuannya seperti lomba dll.

“Tentunya sosialisasi yang seperti model tatap muka, model satu arah itu sudah kurang menarik makanya kami melaksanakan sosialisasi dalam bentuk pagelaran seni, lomba kreasi pentas seni, KPU run dll. Sebagainya hal itu merupakan suatu upaya untuk menarik minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut juga kita sampaikan

sosialisasi mengenai Pemilu 2019. Seperti mensosialisasikan menggunakan media itu sudah kurang efektif sehingga kami datang langsung ke *kompolan-kompolan* karena masyarakat Sumenep khususnya beda laa mungkin kalau di Jawa tidak ada se unik di Madura di *kompolan* yg dilaksanakan satu minggu sekali kita masukin punya relawan, seperti PPS, dan PPK disitu kita sampaikan sosialisasi mengenai pemilu. Datang saja ke TPS sudah bagus pilih sesuai hati nuraninya kenali calonnya datang ke TPS tidak lama hanya sebentar paling 5 menit untuk menentukan nasib lima tahun ke depan.” (Wawancara. Adi 13 April 2019).

Pernyataan dari Pak Adi selaku Kesubbag teknis Pemilu dan Hubmas sosialisasi seperti model tatap muka dan model satu arah kurang efektif sehingga KPU Sumenep merubah dengan cara lain seperti pentas seni, lomba kreasi, dan KPU run dan juga kaos-kaos yang betulis dengan nama Golput bukan solusi ayo nyoblos.

#### **Hambatan KPU Sumenep saat melakukan sosialisasi dalam menekan angka Golput**

Komisi Pemilihan Umum Sumenep dalam menekan angka Golput pada Pemilu 2019, memiliki beberapa hambatan. Ini menjadi tanggung jawab sangat serius dengan Kabupaten Sumenep yang begitu luas geografisnya.

Seperti pernyataan Pak Anwar selaku Sekretaris KPU Sumenep menyampaikan bahwa hambatan selama Pemilu 2019 terdapat dibagian siswa yang baru menggunakan hak pilihnya sebagai berikut.

“Kalau berbicara masalah hambatan pada Pemilu 2019 sebenarnya ada, tapi tidak cukup berarti bagi kita merasa lancar-lancar saja ditingkat pelajar yang dulunya mengira seperti pelajar SLTA acuh tidak acuh ternyata jalan dan lancar nyaris tidak ada hambatan. Di KPU itu ada divisi yang membidangi sosialisasi dan di PPK juga ada divisi yang membidangi sosialisasi ditingkat desa ada yang membidangi sosialisasi, sebelum menyampaikan sosialisasi ada bimbingan teknis (BIMTEK) kepada mereka setelah itu baru menyampaikan kepada masyarakat. Kami terus melakukan sosialisasi dengan geografis Kabupaten Sumenep yang begitu luas dengan pulau-pulainya sangat banyak. Saat ini KPU Sumenep dengan rekan-rekan disetiap Kecamatan kami bekerjasama untuk mampu menjangkau 9 Kecamatan yang ada di Sumenep kepulauan dengan anggaran lumayan banyak terutama dibagian kepulauan”. (Wawancara. Anwar, 22 April 2019).

Pernyataan Pak Anwar berbeda dengan Pak Adi selaku Kesubbag teknis Pemilu dan Hubmas menyampaikan sebagai berikut.

“Setiap teknis kita tetap bisa melaksanakan di desa kita ada PPS, di Kecamatan ada PPK.



Hambatan terbesarnya dibagian kecamatan kepulauan misal di pulau sapekken itu ada desa yang dimana desa tersebut masih punya dusun dan dusun lagi ini yang KPU Sumenep tidak kesana sehingga kami mengutamakan PPS dan PPK yang bisa ketingkat Dusun. Memang tidak ada hambatan yang sulit untuk melakukan sosialisasi kecuali hambatan terbesarnya saat mengirimkan lembar logistik ke bagian sumenep pulau itu sampai gelaran Pemilu 2019 tinggal H-5 Surat suara pencoblosan itu belum terkirim, kendalanya belum ada kapal yang datang dari Kepulauan dan pada saat itu Tim KPU Sumenep terus berkoordinir dengan tim yang ada dibagian kepulauan, Sehingga baru bisa dikirim H-2 atau Pemilu 2019 tinggal dua hari lagi. Hambatan tentunya ada masyarakat selama kita melakukan sosialisasi tentang Pemilu ini kita dianggap tim kampanye, juru kampanye KPU Sumenep disangka membagi-bagi hadiah kepada mereka padahal kita menyampaikan informasi tahapan-tahapan Pemilu yang telah berlangsung dan sedang berlangsung". (Wawancara. Adi 13 April 2019).

Hambatannya ialah sebuah kendala yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan tersebut terganggu sehingga tidak dapat berjalan dengan baik. Dengan begitu akan dapat berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh. KPU Sumenep dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menekan angka Golput pada Pemilu 2019 terdapat beberapa hambatan dalam proses pelaksanaan sebagai berikut.

#### **Kurangnya dukungan finansial untuk sosialisasi**

Langkah ini merupakan bagian yang sangat penting dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep untuk dapat merumuskan tindakan yang diambil, sehingga pola-pola apa saja yang digunakan untuk memperoleh tujuan yang sudah ditentukan. KPU Sumenep dalam tahap ini terdapat beberapa kendala seperti anggaran sosialisasi kurang yang diberikan oleh pemerintah sehingga belum seimbang dengan jumlah penduduk dan luas wilayah Kabupaten Sumenep, pada formulasi program sosialisasi KPU Sumenep belum tercapai secara keseluruhan tindakannya dalam sosialisasi Pemilu, tetapi KPU Sumenep hanya memilih sebagian alternatif yang dianggap paling penting. Dari hambatan tersebut maka sangat penting bagi KPU Sumenep dan Pemerintah untuk lebih peduli mengenai kesiapan finansial dalam mendukung pelaksanaan sosialisasi Pemilu berikutnya.

#### **Kurangnya respon masyarakat dalam sosialisasi**

Tanggapan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Pemilu masih kurang terutama dalam sosialisasi, sehingga kedepannya masyarakat khusus Sumenep dalam menerima agar lebih baik agar

informasinya tersampaikan. Agar relawan demokrasi dengan masyarakat memiliki hubungan yang baik saling mengerti satu sama lain.

#### **Keterbatasan sumber daya manusia**

Sumber daya manusia ialah unsur yang paling utama dalam mendukung demi mencapai suatu kegiatan, sehingga akan berpengaruh terhadap pencapaian kinerja yang akan diperoleh. Kendalanya Kabupaten Sumenep begitu besar pulaunya dibandingkan dengan Kabupaten lain di Madura.

Pernyataan yang berbeda disampaikan oleh mas Abdul Waris selaku relawan demokrasi menyampaikan beberapa hambatan saat relawan demokrasi melakukan sosialisasi diantaranya sebagai berikut.

"Yeee....hambatan utamananya mas, terkesan kanyak parpol seakan-akan gimana gt kesannya, maka kami jawab ini acaranya relawan demokrasi bukan parpol ditanyakan uangnya terlebih dahulu lagi meskipun penyandang disabilitas tetap seperti itu, acuh tak acuh. Kalau yg berkebutuhan khusus kami pernah melakukan sosialisasi kelapas mereka kan punya hak suara jadi mereka boleh nyoblos tapi tetap diruangan khusus yg disediakan setelah itu mereka balik lagi ke dalam tahanan. Yaaa kan hambatan sebenarnya ada dua mas pertama hambatan eksteren itu adalah hambatan yang bersentuhan langsung dengan lapangan mas ada keterlambatan. Hambatan interen kadang dari KPU informasinya simpang siur sosialisasi pertama alat peraganya belum dikasih semua dikasih belakangan ada yang bilang dari masyarakat KPUnya masih kurang semangat untuk mendampingi relawan demokrasi, hal seperti ini seharusnya saling mendukung". (Wawancara, Abdul Waris. 19 Juli 2019).

Keterangan dari mas Abdul Waris selaku relawan demokrasi memberikan penjelasan bahwa, hambatan utama saat relawan demokrasi melakukan sosialisasi pertama ditanyakan jumlah uang yang mau dikasih berapa. Sedangkan hambatan yang sebenarnya ada dua yaitu hambatan eksteren dan hambatan interen. Dimana hambatan secara eksteren adalah hambatan yang bersentuhan langsung dengan lapangan artinya ketika relawan demokrasi melakukan sosialisasi berhasil apa tidak mengajak masyarakat. Hambatan secara interen adalah hambatan di dalam KPU Sumenep sendiri banyaknya keterlambatan alat peraga saat mau melakukan sosialisasi, dan kurangnya pendamping KPU Sumenep terhadap relawan demokrasi.

Tahap yang terakhir yang dilakukan oleh KPU Sumenep yaitu melakukan penilaian terhadap strategi sosialisasi yang digunakan untuk menekan angka Golput. Penilaian yang dilakukan disampaikan langsung oleh beberapa informan yang sudah diwawancarai oleh peneliti sebelumnya diantaranya sebagai berikut.

“Pertama, menilai begini konsepnya seperti ini berikan pemahaman terlebih dahulu supaya masyarakat memahami betul menyalurkan suara itu penting kemudian ketika ada yang Golput kita melakukan penilaiannya bagaimana, karena tidak datang banyak sekali faktornya. KPU Sumenep sebenarnya dalam strategi untuk menyalurkan itu menggunakan *kompolan*, tambahan sebenarnya secara teknis kami sudah fasilitasi semua misalnya teman-teman mahasiswa yang ada di daerah tertentu tidak bisa pulang bisa mengurus k5nya sebenarnya kita sudah menyiapkan wadah dengan harapan semuanya bisa menggunakan hak pilihnya. Secara kelembagaan KPU Sumenep sudah memfasilitasi sebenarnya bagaimana mereka yang tidak ada di daerah asalnya bisa menggunakan pindah pilihnya”. (Wawancara. Anwar, 22 April 2019).

Pak Anwar memaparkan pernyataannya penilaian yang dilakukan oleh KPU Sumenep dengan melihat jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. Sedangkan masyarakat Sumenep yang tidak bisa pulang maka KPU Sumenep menyiapkan menggunakan pindah pilih. Sehingga nanti mereka bisa menyalurkan hak pilihnya supaya tidak Golput.

“Kedua, tentu KPU Sumenep nanti salah satunya melihat faktor tingkat kehadirannya mas, itu standar layak tapi lebih sebenarnya, apakah masyarakat semakin cerdas dalam memahami Pemilu ini ending terakhir adalah tingkat kehadiran disaat Pemilu itu tinggi sesuai dengan DPT yang ada dan yang terakhir kalau dilihat secara statistik dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat di TPS, jadi kalau ditanya kapan dievaluasi kita melihat tingkat kehadiran di TPS di wilayah mana yang kurang, kenapa kurang karena dengan adanya media sosial kita melihat dan terus memantau”. (Wawancara. Adi, 13 April 2019).

Pernyataan yang sama diutarakan oleh bapak Adi selaku Kesubbag teknis Pemilu dan Hubmas untuk melakukan penilaian KPU Sumenep melihat tingkat kehadiran masyarakat di setiap TPS ini secara statistik. Kemudian nanti dievaluasi secara keseluruhan, maka dari itu jumlah TPS di setiap desa di tahun 2019 ditambah oleh KPU Sumenep.

“Ketiga, KPU Sumenep ini setiap kegiatan ada kelompok kerjanya yang melaporkan seluruh kegiatan yang dilakukan setelah selesai kegiatan, kita bisa melihat kedisaran masyarakat misal mengundang masyarakat 100 datangnya 80, maka dari ini dilakukan evaluasi. Ada evaluasi teknis yaitu evaluasi dengan melakukan evaluasi secara langsung didalam ruangan, kesadarannya kurang, atau masyarakat tidak senang kalau didudukkan dalam ruangan sehingga kehadiran sosialisasi kurang. Dalam melakukan evaluasi tidak bisa satu

bahkan dua sampai tiga kali evaluasi”. (Wawancara. Anwar, 22 April 2019).

Pernyataan pak Anwar selaku sekretaris KPU Sumenep menyampaikan bahwa di kantor Sumenep yang sekarang setiap kegiatan yang dilakukan ada kelompok kerjanya masing-masing untuk melakukan evaluasi agar bisa lebih cepat diperbaiki, sehingga tidak menunggu waktu lama untuk mengevaluasi.

“Keempat, KPU Sumenep melakukan monitoring evaluasi mas, setiap kegiatan pasti ada hasilnya, contoh Undang-Undang no.7 yang ditujukan kepada ormas diawal ada instrumen dan diakhir juga ada *instrument* lalu kita minta masukan tentang baik atau yang tidak baik itu kita kaji setiap minggu kita ada rapat pleno”. (Wawancara. Pak Warist, 06 Mei 2019).

Keterangan yang berbeda dijelaskan oleh bapak Warist selaku ketua KPU Sumenep langkah selanjutnya melakukan monitoring evaluasi. Artinya setiap melakukan sesuatu pasti ada hasilnya yang diperoleh.

“Kelima, ketika kegiatan disuatu tempat kita catat dan dibicarakan dengan teman-teman disemua kantor KPU Sumenep, cara mengelola sudah benar apa belum, cara merumuskan sudah benar apa belum, dan persentasenya. Dan nanti kita melakukan rapat bersama untuk mengevaluasi”. (Wawancara. Hadi, 15 Mei 2019).

Jadi dapat disimpulkan dari pernyataan di atas bahwa untuk melakukan penilaian, KPU Sumenep melihat jumlah masyarakat yang datang ke TPS secara statistik, serta ada tim kerja yang melaporkan setelah itu baru dilakukan monitoring evaluasi dan terakhir diadakan sebuah agenda rapat bersama seluruh anggota KPU Sumenep untuk mengevaluasi secara keseluruhan.

## Pembahasan

Pemilihan umum di Indonesia merupakan sebuah pesta demokrasi secara langsung yang dilaksanakan seluruh masyarakat Indonesia untuk memilih pemimpin lima tahun kedepan yang akan memimpin suatu negara. Dimana masyarakat melakukan pencoblosan terhadap calon pemimpin yang akan dipilihnya, sehingga suara mayoritas menentukan siapa yang menjadi pemimpin. Maka dari itu setiap warga negara wajib menyalurkan hak suaranya demi kepentingan dan kesejahteraan bersama.

Pemerintah sudah menganjurkan agar masyarakat tidak Golput, tapi mengapa masih banyak masyarakat yang masih melakukan atau memberlakukan sistem itu disebabkan oleh pemikiran yang masih kurang memahami terkait politik, sehingga mereka berfikir akan merasa rugi jika mereka melakukan pencoblosan karena yang mereka dapat hanya akan buang-buang waktu saja, masyarakat lebih baik mengerjakan pekerjaan rumah dari pada mereka mendatangi TPS setempat.

Berbeda dengan tiga Kabupaten yang ada di Madura, Kabupaten Sumenep mempunyai jumlah penduduk lebih tinggi sehingga berpengaruh besar pada partisipasi masyarakat untuk mengurangi angka Golput, sesuai dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti menemukan bahwa. Di Kabupaten Sumenep partisipasi masyarakat untuk Pemilu 2019 sudah baik dengan angka partisipasinya yaitu 81% dapat dipastikan angka Golput sangat kecil. KPU Sumenep tidak pernah memaksa masyarakat untuk datang namun hal yang dilakukan hanya memaksimalkan strategi sosialisasi dengan demikian masyarakat menyadari dan lebih mengerti tentang demokrasi.

Begitupun dengan pendidikan politik, pendidikan pemilih, dan pendidikan demokrasi dimana KPU Sumenep banyak melakukan suatu *event-event* besar seperti dangdut, pentas seni, lomba selfi di setiap TPS, dan KPU run. Hal semacam ini merupakan bentuk strategi sosialisasi yang dilakukan untuk menarik simpati khususnya masyarakat Sumenep yang masih muda-muda supaya tidak Golput, di samping memilih agar bakat bisa tersalurkan dengan baik.

Terkait pemilihan umum (PEMILU) 2019 yang dilaksanakan secara serentak diseluruh daerah-daerah lain di Indonesia pada tanggal 17 April 2019 khususnya di Kabupaten Sumenep. Strategi sosialisasi yang digunakan sudah berkontribusi dengan positif untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan strategi tersebut dengan baik.

Suatu hasil penelitian tentang strategi sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep dalam menekan angka Golput pada Pemilu 2019 dan dikaitkan dengan teori yang digunakan sebelumnya yaitu, teori strategi Fred R. David proses manajemen strategi mengemukakan ada tiga bagian yaitu.

### Penyusunan strategi

Untuk menentukan strategi-strategi yang akan digunakan tentunya memerlukan kerjasama, ide-ide, dan perencanaan yang benar antara semua lembaga. Untuk itu dibutuhkan suatu rapat besar dan dibicarakan oleh komisioner rapat pleno. Serta setelah itu dibuatkan berita acara dan ditanda tangani bersama, kemudian dijadikan sebuah kebijakan.

Secara umum strategi itu tertuang dalam Undang-Undang dan peraturan KPU, namun secara teknis masing-masing Kota/Kabupaten memiliki strategi khusus untuk mendekati pemilih itu agar menggunakan hak suaranya. Tentunya strategi tersebut bisa dijabarkan diantaranya sebagai berikut: (1) Strategi secara kelompok; (2) Strategi secara kekeluargaan; (3) Strategi secara aktif; (4) Strategi sosialisasi; (5) Strategi melalui media massa.

### Pelaksanaan strategi

Pelaksanaan strategi sosialisasi melawan demokrasi tersebut memiliki beberapa program, dan metode khusus seperti metode tatap muka langsung, dialog, ceramah, tanya jawab, melalui media, media cetak, dan simulasi serta permainan *game* yang berisi pesan kepemiluan di dalamnya. Pelaksanaan strategi sosialisasi ini berkaitan dengan sumber daya manusia berupa kemampuan individu atau organisasi dalam melaksanakan suatu kegiatan, sehingga dengan sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan untuk dapat mencapai sebuah visi, misi, dan tujuan yang ditentukan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep dalam usaha meningkatkan sumber daya manusia, panitia penyelenggara pemilihan umum berupaya melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap pegawai KPU dan seluruh panitia *ad hoc*, kegiatan tersebut berupa pelaksanaan bimbingan teknis (BIMTEK) kepada semua panitia Pemilu dengan materi yang dijelaskan agar nantinya sosialisasi dilapangan berjalan dengan baik.

### Penilaian strategi

KPU Sumenep dalam melakukan penilaian bekerja sama untuk melakukan penilaian secara keseluruhan. Cara melakukan penilaiannya diantaranya sebagai berikut. (1) Melihat jumlah masyarakat yang datang ke TPS; (2) Jumlah statistiknya, artinya disini dilihat dari daftar pemilih sementara (DPS) dan juga daftar pemilih tetap (DPT) dari sini nanti diketahui partisipasi masyarakat Sumenep meningkat atau menurun; (3) KPU Sumenep melakukan monitoring evaluasi. Artinya setiap kegiatan yang dilakukan itu ada kelompok kerjanya masing-masing yang akan melaporkan hasilnya, kemudian dilakukan evaluasi; (4) Rapat pleno, artinya tahap terakhir untuk memperoleh hasilnya KPU Sumenep melakukan suatu agenda besar yaitu rapat pleno saat karyawan dan staf keseluruhan tidak ada kegiatan lain.

Dalam melakukan sosialisasi melawan demokrasi memiliki beberapa hambatan yang dialami diantaranya sebagai berikut, ada hambatan secara eksteren dan hambatan secara interen. Dimana hambatan secara eksteren bersentuhan langsung dengan lapangan artinya melawan demokrasi berhasil atau tidak melakukan sosialisasi untuk mengajak masyarakat Sumenep dalam Pemilu 2019, sedangkan hambatan secara interen itu terdapat di dalam KPU Sumenep seperti keterlambatan alat peraga yang akan digunakan saat sosialisasi oleh melawan demokrasi serta kurangnya dampingan dari KPU Sumenep terhadap melawan demokrasi itu sendiri.



## PENUTUP

### Simpulan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah suatu lembaga penyelenggara Pemilu yang ada di Indonesia. Dimana setiap warga negara yang sudah memiliki hak pilih serta mempunyai hak untuk memilih calon pemimpin sesuai dengan hati nuraninya tanpa ada paksaan dari orang lain. Partisipasi masyarakat khususnya kabupaten Sumenep sangat diperlukan, sebab sebagai syarat untuk suksesnya Pemilu 2019 yaitu dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka angka Golput bisa tertekan.

Suatu hasil penelitian yang diperoleh bagaimana strategi sosialisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep dalam menekan angka Golput pada Pemilu 2019 strategi yang digunakan yaitu, strategi sosialisasi kepada: pedagang pasar, masyarakat nelayan, masyarakat adat, penyandang disabilitas, umat agama, keluarga, pemilih pemula, pemilih pemuda, masyarakat marjinal, komunitas, pemilih perempuan, pemilih berkebutuhan khusus, warga internet, dan komunitas peduli demokrasi. Adapun hambatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep saat melakukan sosialisasi dalam menekan angka Golput pada Pemilu 2019 diantaranya sebagai berikut yaitu: hambatan secara eksteren, bersentuhan langsung dengan lapangan seperti sosialisasi yang dilakukan oleh relawan demokrasi. Secara interen, adanya keterlambatan alat peraga yang diberikan oleh KPU Sumenep kepada relawan demokrasi. Kurangnya dukungan finansial untuk sosialisasi, Kurangnya respon masyarakat Kabupaten Sumenep dalam sosialisasi, dan keterbatasan sumber daya manusia.

Strategi sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep dalam menekan angka Golput pada Pemilu 2019 dikatakan berhasil, karena tingkat partisipasi masyarakat meningkat dari pada Pemilu yang sebelumnya. Pada Pemilu tahun 2019 tingkat partisipasi sebesar 81% dan angka Golput sebesar 19%, sehingga angka Golput sangat kecil. KPU Sumenep ini menjadi contoh dari Kabupaten yang berada di Madura lainnya. Sebab sudah mampu menekan angka Golput pada Pemilu 2019.

### Saran

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat disarankan bahwa Komisi Pemilihan Umum Sumenep dalam menggunakan strategi sosialisasi lebih baik lagi untuk mengurangi angka Golput pada Pemilu selanjutnya, juga bekerjasama dengan masyarakat sebagai pelaksana pemilihan saling baur membaur demi meningkatkan partisipasi masyarakat Sumenep agar nantinya angka Golput di Kabupaten Sumenep semakin

menurun. Dan pemerintah Kabupaten Sumenep harus menambah jumlah anggaran pada Pemilu selanjutnya, serta KPU Sumenep lebih siap lagi untuk merekrut relawan demokrasi agar nantinya tidak ada keterlambatan lagi seperti alat peraga yang akan digunakan oleh relawan demokrasi saat melakukan sosialisasi kepada masyarakat Sumenep.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Wedi. 2017. *Strategi polres sampan dalam memberantas peredaran narkoba di kabupaten sampan Madura*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Cresweel, J.W. 2013. *Penelitian kualitatif & desain riset. Pustaka belajar*: Yogyakarta
- Efriza, 2012. *Political explore: Sebuah kajian ilmu politik*. Alfabeta. Bandung.
- Fred R. David 2012. *Manajemen Strategi Konsep*. Jakarta: Pt. Prenhallindo
- <https://www.radarmadura.jawapos.com> (diakses tanggal 21 Juli 2019)
- Mery Anggrainy. 2018. *Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih (Studi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2018 dan Pemilihan Umum 2019)*. Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Haryono, D, dkk. 2016. Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota Samarinda tahun 2015. Dalam *eJournal Administrative Reform*, ISSN 2338-7637, Volume 4, Nomor 2.
- Moleong, lexy J. 2010. *Metode penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Petrus Gleko dkk, 2017. *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah*. Dalam *jurnal ilmu sosial dan politik*, ISSN 2442-6962, Volume 6, Nomor 1.
- Prasetyoningsih, N. 2014. *Dampak pemilihan umum serentak bagi pembangunan demokrasi Indonesia*. Dalam *Jurnal Media Hukum*. Volume 21.
- Sendhikasari, D.D. Partisipasi Pemilih menjelang pemilu 2014 dalam *Jurnal Info Singkat Pemerintahan dalam Negeri* Vol. V, No. 18/II/P3DI/September/2013
- Soebagio. (2008). Implikasi Golongan Putih dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Makara, Sosial Humaniora* Vol.12 No.2 Desember 2008. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta.